

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2013). *Membangun Sistem Pemilu Online Menggunakan Advanced Encryption Standard (AES)*. UNNES Journal of Mathematics.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Affiani, Y. A. N. (2021). *Relasi Prinsip Al-Musawah dengan Judicial Rivew Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi*. Universitas Islam Negeri Banten. 35(1), 43–50.
- Arfana., N. T. (2022). *Partai Garuda Uji Soal Menteri Maju Capres*. Mahkamah Konstitusi.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18340&menu=2>
- Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, T. H. N. (2022). *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Annisa. (2023). *Asas Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia*. Fakultas Hukum UMSU.
<https://fahum.umsu.ac.id/asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia/>
- Afrijal, A., Helmi, H., Latif, I. R., & Usman, B. (2023). *Penguatan Etika Pemerintahan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan*. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 8(4), 269-275.
- Biru, M. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara*. EJournal Ilmu Pemerintahan, 8(2).
- Bachtiar, F. R. (2014). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*. Jurnal Politik Profetik. 3.
- Blitar, B. K. (2022). *Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Seabrek Tantangannya, Siapkah*. Bawaslu Kab. Blitar. <https://blitar.bawaslu.go.id/berita/pemilu-serentak-tahun-2024-dengan-seabrek-tantangannya-siapkah>
- Betresia, A., Situmeang, S. W., Verdina, P., Jannah, L. M., & Oktafia, E. (2021). *Korupsi Bantuan Sosial COVID-19: Analisis Implementasi Etika Normatif Pejabat Publik di Indonesia COVID-19*. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(2), 138-154.
- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, C. Y. P. (2016). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Djamil, M. N., & Djafar, T. M. (2016). *Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 12(01), 1775-1760.
- Dedi, A. (2019). *Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak*. Jurnal Moderat. 5, 213–226.

- Deria, C. I. (2021). *Hak Pilih Masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Desinta Dwi Rapita, Soedarsono, I. (2014). *Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 dan 2019*. Magister Thesis, Universitas Brawijaya.
- Denisatria, M. F. (2018). *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*. Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162/>
- Eddyono, L. W. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi.
- Efriza. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Sistem Presidensial*. Jurnal Renaissance.
- Fishabilillah, F. (2015). *Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi*. Universitas Padjadjaran. 7–8.
- Ibrohim, A. N. (2023). *Profil Partai Garuda, dari Sejarah hingga Capaian dalam Pemilu*. Sidonews.com.
<https://nasional.sindonews.com/read/1009441/12/profil-partai-garuda-dari-sejarah-hingga-capaian-dalam-pemilu-1675062106>
- Iftiyatna, Y. (2022). *Pengaturan Cuti Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. 9(5), 1626–1632.
- Indonesia, K. H. dan H. A. M. R. (2024). *Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis*. Kemenkumham.
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en
- Isra, S. (2009). *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi Dalam Sistem Presidensial*. Jurnal Konstitusi, PUSaKO Universitas Andalas.
- Isra, S. (2016). *Menjadi Pembantu Presiden*. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. <https://pusako.or.id/index.php/12-opini/95-menjadi-pembantu-presiden>
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Isnantiana, N. I. (2017). *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- Kusumawati, M. P. (2019). *Harmonisasi Antara Etika Publik dan Kebijakan Publik*. Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1.
- Kurnia, R. A. (2023a). *Menteri Maju Pilpres, Kabinet Indonesia Maju diyakini Tetap Solid*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1075393/menteri-maju-pilpres-kabinet-indonesia-maju-diyakini-tetap-solid>
- Kurnia, R. A. (2023b). *Prabowo dan Mahfud MD Maju Pilpres, Tidak Perlu Mengundurkan Diri*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1075404/prabowo-dan-mahfud-md-maju-pilpres-tidak-perlu-mengundurkan-diri>
- Minan, A. (2020). *Netralitas Birokrasi dan Abuse Of Power Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Keadilan Pemilu.
- Nugoho, R. (2016). *Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Ilmu Hukum Novelty.
- Nibraska Aslam, A. (2022). *Inkonstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022*. FKPH Universitas Brawijaya. <https://fkphbrawijaya.or.id/2022/11/21/inkonstitusionalitas-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xx-2022-strong/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Pratama, M. F., Studi, P., Tata, H., Islam, U., & Salatiga, N. (2023). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.68/PUU-XX/2022 Tentang Pengunduran Diri Menteri Ssebagai Peserta Calon Pemilu Prespektif Masalah*.
- Rio R, M., Dewi, R., & Agustina, S. (2021). *Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 5(2), 241-252.
- Raden Imam Al Hafis, M. A. Y. (2017). *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia*. PUBLIKA. ABUSE OF POWER.pdf
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press
- Subhi, A. F. (2014). *Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres*. In *Jurnal Cita Hukum* (Vol. 3, Issue 2).
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normative, Empiris, Pemulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (I. Marhani (ed.)). DOTPLUS Publisher.

- Setyagama, A. (2015). *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Good Governance Melalui Judicial Review Terhadap Undang-Undang*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum.
- Soeroso, F. L. (2014). *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi.
- SY, H. C. (2023). *Pemilu Dan Etika Menteri*. Universitas Bung Hatta. <https://bunghatta.ac.id/artikel-393-pemilu-dan-etika-menteri.html>
- Syauyiid Alamsyah, N. (2023). *Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Prespektif Perbandingan Sistem Presidensial Vs Sistem Parlamenter di Kasus Indonesia dan Inggris*. Jurnal Adhikari.
- Suhendar, A. (2010). *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)*. Jurnal Wacana Kinerja.
- Siso, E., Ruru, J. M., & Londa, V. (2016). *Pengaruh Etika Jabatan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Disekretariat Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik, 1(37).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Uswatun, L. (2021). *Yuk, Kenali Macam-macam Analisis pada Data*. Do Lab. <https://dqlab.id/yuk-kenali-macam-macam-analisis-data>
- Wawan, Y. M. M. (2020). *Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang*. JSPG: Journal of Social Politics and Governance.
- Wijaya, Y. (2019). *Kode Etik Hakim*. Pengadilan Agama Unaaha. <https://www.pa-unaaha.go.id/standar/kodeetik%20hakim/4185#:~:text=Kode%20Etik%20Hakim%20adalah%20seperangkat,dalam%20dan%20di%20luar%20institusi>.
- Yuliandri. (2019). *Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?*. Hukum Onlane. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607/>
- Yuliana, A. (2024). *Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia*. *Forschungfrom Law Journal*.